

RENCANA INDUK – PELABUHAN – KUALA TANJUNG – RENCANA INDUK PELABUHAN
2012

PERMENHUB NOMOR PM 20 TAHUN 2012, 34 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KUALA TANJUNG

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN (No. 4437); UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.68, TLN No. 4725); UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.151, TLN No. 5070) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.193, TLN No. 5731); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.27, TLN No. 5109); PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERPRES No. 13 Tahun 2014; KEPMENHUB No. KM 54 Tahun 2002; KEPMENHUB No. KM 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. KM 62 Tahun 2010; PERMENHUB No. KM 63 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 54 Tahun 2011; PERMENHUB No. KM 64 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 46 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Kuala Tanjung yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya, Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung.

- CATATAN : - Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
- Permenhub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2012;
 - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 3 April 2012.